

STUDI DESKRIPTIF TENTANG EFEKTIVITAS DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PEMERINTAH KAMPUNG DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG (DPMK) KABUPATEN BIAK NUMFOR

Rijal^{1*}, D Rudolf Leiwakabessy²

^{1,2}Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak

*Korespondensi: rijalbudiman020390@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur untuk dapat menilai sejauh mana kemandirian suatu masyarakat, untuk itu sesuai dengan tujuan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan fungsinya sebagai penetapan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Biak Numfor berdasarkan studi deskriptif yakni menggambarkan secara jelas pelayanan yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat kampung dengan baik dan optimal. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas dalam meningkatkan pelayanan pemerintah Kampung di dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan baik. karena Kejelasan tujuan yang hendak dicapai belum terorganisir dengan baik, Kejelasan strategi pencapaian tujuan belum efektif, sehingga pemberdayaan masyarakat kampung hanya berfokus pada visi dan misi pemerintah daerah namun strategi yang dilakukan kurang melibatkan pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap belum optimal disebabkan karena sosialisasi kebijakan yang dilakukan kepada pemerintah kampung dan masyarakat kurang efektif sehingga analisis kebijakan kadang tidak sesuai dengan fakta dilapangan, Perencanaan yang matang terlihat baik karena program yang dilaksanakan sudah ada meskipun pelaksanaannya belum efektif. Penyusunan program yang tepat hal ini karena sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dalam melaksanakan tugas pokok untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan, Pemberdayaan, Masyarakat Kampung

ABSTRACT

Community empowerment is one of the benchmarks to be able to assess the extent of the independence of a community, for this is in accordance with the objectives of Improving Community Services at the Village Community Empowerment Service (DPMK) of Biak

Numfor Regency in accordance with its function as setting technical policies, providing support for regional government administration , coaching and carrying out tasks, carrying out other tasks assigned by the regent/mayor in accordance with their duties and functions. The purpose of this study was to determine effectiveness in improving community services at the Biak Numfor Village Community Empowerment Service (DPMK) based on studies descriptive namely clearly describing the services carried out to empower the village community properly and optimally. The research methodology used is a qualitative method. The data obtained are primary and secondary data. As for data collection techniques using interview techniques, observation and documentation with related parties. The results of the study show that effectiveness in improving village government services at the Village Community Empowerment Service (DPMK) of Biak Numfor Regency has not gone well. because the clarity of the goals to be achieved is not yet organized well, the clarity of the strategy for achieving goals has not been effective, so that the empowerment of village communities only focuses on the vision and mission of the local government but the strategies carried out do not involve the village government in improving services to the community, the process of analyzing and formulating solid policies is not optimal due to poor socialization of policies carried out for the village government and the community is less effective so that policy analysis is sometimes not in accordance with the facts on the ground. Careful planning looks good because the implemented program already exists even though its implementation is not yet effective. The preparation of the right program is because the human resources and facilities and infrastructure owned are inadequate in carrying out basic tasks to improve services to the community.

Keywords: *Effectiveness, Service, Empowerment, Village Community*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling mengetahui secara pasti segala kondisi yang terjadi di wilayah desa yang ada. Oleh karena itu, masukan pemerintah atas berbagai fakta menjadi sangat penting dan diperlukan dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah dan nasional yang akan mempengaruhi pertumbuhan secara keseluruhan. DPMK karenanya harus nyata dan semakin menuntut kerja keras dan kemampuan ideal dalam pelaksanaannya, terutama yang terkait dengan penyajian data dan informasi yang diperlukan untuk kemudahan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Totok Mardikanto

dalam (Sulasih et al., 2022) menjelaskan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah praktik membantu individu, terutama mereka yang memiliki sedikit sumber daya, perempuan, dan kelompok terpinggirkan lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat yang saat ini tidak mampu melepaskan diri dari rantai kemiskinan dan keterbelakangan. (Arfianto & Balahmar, 2014). Olehnya itu Kepala Dinas membawahi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penataan dan penetapan kebijakan daerah yang khusus berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan menurut Suharto dalam (Rosilawati et al., 2021) Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan yang ada pada mereka sehingga menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Payne dalam (Amri & Ferizko, 2020) menekankan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberi orang kemampuan untuk memutuskan sendiri kegiatan apa yang akan mereka lakukan, termasuk menurunkan dampak hambatan sosial dan pribadi untuk bertindak. Sedangkan menurut Widjaja dalam (Endah, 2020) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan.

Pada umumnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa melaksanakan tugasnya sebagai: a). menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya; B). pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya; c.) mengembangkan dan melaksanakan tugas sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya; dan d.) melakukan tugas lainnya. adapun Tujuan dan Sasaran DPMK terwujudnya pemerintahan yang efektif di desa, berkembangnya kapasitas dan profesionalisme yang lebih besar antara perangkat desa dan organisasi masyarakat, serta tercapainya tujuan aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Biak Numfor. meningkatkan keterlibatan kelembagaan masyarakat dalam program pembangunan desa, penguatan peran kelembagaan lokal dalam pemberdayaan

masyarakat, terciptanya pemberdayaan tradisi budaya dan sosial budaya daerah, serta pemberdayaan dan kesejahteraan sosial bagi keluarga, penciptaan pemberdayaan usaha ekonomi kerakyatan melalui penumbuhan usaha keluarga dan kelompok masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengembangan teknologi tepat guna, pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga sosial untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah, penciptaan prasarana dan sarana yang lebih banyak dan berkualitas di desa. Selaras Menurut Mardikanto dalam (Novatna & Adnan, 2020) Pemberdayaan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, dan komunitas yang lebih besar sehingga mereka memiliki kebebasan untuk memilih dan memiliki pengaruh atas lingkungannya untuk mencapai tujuan mereka, termasuk memiliki akses ke sumber daya untuk pekerjaan dan pekerjaan mereka. kegiatan sosial.

Badan Pemberdayaan masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Biak Numfor, Papua beralih status dari badan menjadi dinas setelah pengesahan perda kelembagaan organisasi dilingkup pemerintah kabupaten. Sekretaris DPMK mengakui bahwa perubahan status BPMK Menjadi DPMK mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang kelembagaan daerah, yang mulai berlaku secara serentak di setiap kabupaten kota. Berdasarkan hasil penilaian hasil penilaian kelembagaan BPMK kabupaten Biak Numfor Tahun 2016 mendapat nilai beban kerja 756 dan berkategori B. secara keseluruhan meskipun ada perubahan dari badan menjadi dinas tidak mengurangi

tugas pokok dan fungsinya dalam membantu pemberdayaan dan perumusan kebijakan masyarakat kampung. (*Biak Antara Papua*).

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa DPMK di Kabupaten Biak Numfor dilihat dari segi instansi terjadi perubahan dari badan menjadi dinas artinya bahwa pada pelaksanaan tugas pokok dalam meningkatkan pelayanan akan terjadi perubahan juga. Pelayanan Masyarakat dapat dibidang efektif apabila masyarakat memberikan kemudahan dalam hal pelayanan sehingga lebih cepat, hemat, murah, responsive dan produktif (Anggraeni, 2022). Sehingga penulis menganalisis bahwa efektivitas yang dibangun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam tugas pokok data sebagai fungsinya masih perlu ditingkatkan agar proses pelayanan yang dilakukan dapat menjadi target *good governance* sesuai dengan prinsip kebijakan publik. Menurut Mahmudi dalam (Sari, 2015) mengemukakan pandangannya. Keterkaitan antara output dan tujuan menentukan efektivitas; semakin organisasi, program, atau aktivitas berkontribusi pada tujuan yang disampaikan maka akan semakin efektif.

Menurut pengamatan DPMK dalam melaksanakan tugas khususnya dalam memberikan pelayanan materi dan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan perencanaan pembangunan masih minim atau belum terlaksana dengan baik, menurut pengamatan awal penulis. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan administrasi, baik administrasi umum, administrasi kependudukan, maupun administrasi keuangan, tidak dilakukan secara benar dan konsisten sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.. Sebagaimana dijelaskan bahwa Pelayanan mengandung makna sesuatu yang bersifat jasa terhadap orang yang memerlukan pelayanan, baik yang diberikan oleh sesuatu lembaga, yayasan, maupun oleh kelompok dan perorangan. (Mansyur, 2013)

Dalam kasus kurangnya pengetahuan atau catatan administrasi yang benar, hal ini disebabkan oleh beberapa pengaruh, terutama sumber daya aparatur yang kurang mampu. Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, menawarkan layanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing sangat penting dalam konteks pemerintahan. Hal ini hanya dapat dilakukan jika permasalahan yang menjadi kewenangan DPMK dapat diselesaikan secara memadai. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa persoalan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut. Permasalahan yang dimaksud antara lain adalah rendahnya kapasitas serta aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan manajemen pemerintahan yang masih belum maksimal.

Peningkatan kualitas sumber daya pegawai menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Sunarto dalam (Taek et al., 2020) menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan komponen penting dari setiap organisasi. Efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada kinerja sumber daya manusianya, khususnya efektivitas para pemimpin dan karyawannya. Akibatnya,

suatu organisasi akan berfungsi secara efektif jika memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendukungnya. Peningkatan kinerja pegawai operasional dalam menjalankan tugas kedinasan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya pegawai. Dedikasi yang kuat untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya secara lebih efektif, efisien dan produktif juga akan dihasilkan dari sumber daya staf yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu untuk melihat keberhasilan dalam pelayanan maka aspek yang penting dilakukan melakukan kerjasama secara kolektif antara pemerintah, Pemerintah Kampung dan Masyarakat melakukan metode dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang dimilikinya, sehingga tingkat partisipasi berjalan dengan baik dan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan baik terutama di Kabupaten Biak Numfor.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan data yang digunakan di dalamnya disampaikan secara verbal berupa kata-kata. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan memperoleh data- data, maka penetapan lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Biak Numfor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi dan proses langsung, metode wawancara dengan teknik penggalian data melalui

diskusi langsung, dan metode pengumpulan dokumentasi dengan proses pengumpulan data dan data serta bukti digunakan sebagai strategi pengumpulan data dalam penelitian ini.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang efektivitas tentang Pembedayaan Masyarakat dan Jurnal serta Kebijakan mengenai fokus masalah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang dikenal dengan “studi literatur” digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya. Dengan mengumpulkan data yang ada, mempelajari dari setiap kesimpulan yang ditarik darinya, dan menggunakan sumber data tersebut sebagai literatur dan referensi dalam memahami dan menginterpretasikan penelitian, digunakan studi literatur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. (Aris et al., 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara institusional kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung struktur organisasi terbentuk pada bulan April 1968. Dengan nomenklatur instansi kantor pembangunan desa dan dipimpin oleh seorang kepala kantor dengan membawahi 12 staf pada tahun 1968-1990. Dengan kepala kantor Suharji Nurcahyono pada tahun 1968-1990 dan setelah itu, hingga sampai pada tahun ini telah terjadi pergantian kepala kantor sebanyak 6 kali. Nomenklatur instansi yang sebelumnya dari Kantor Pembangunan Desa berubah menjadi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan pada tahun 2000 berubah menjadi Badan

Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2004 berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada tahun 2004 sampai dengan sekarang Nomenklatur berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati membawahi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Membantu Bupati dalam memimpin, melakukan pembinaan, mengkoordinasikan, menyusun, menetapkan arah bidang keahlian dan program kerja Dinas, merumuskan dan mengawasi pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa bidang dalam melaksanakan tugas di Kabupaten

Biak Numfor merupakan tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Biak Numfor

Pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui program yang telah direncanakan sebelumnya melalui dinas pemberdayaan masyarakat kampung kabupaten Biak Numfor, sebagaimana dijelaskan oleh Thoha dalam (Meitaningrum et al., 2013) mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi. maka dari itu program kegiatan pemerintah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Capaian Program	
			Tolak Ukur	Target
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Surat Menyurat	Biak	Terlaksananya Jasa surat menyurat	1 Tahun
2	Penyediaan jasa Komunikasi sumber air	Biak	Terlaksana	12 Bulan
3	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Biak	Terlaksannya Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Tahun
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Biak	Terlaksannya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Biak	terlaksananya penyediaan tenaga harian	2 orang
6	Penyediaan Jasa	Biak	Terlaksannya Jasa	1 Tahun

	Kebersihan Kantor		Kebersihan Kantor	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Biak	Terlaksananya Pelayanan Kantor	1 Tahun
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biak	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun
9	Terlaksananya Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Biak	Penyediaan Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Biak	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar dan dalam Daerah	Jayapura/Jakarta	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	1 Tahun
B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur				
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Biak	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 Tahun
C. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Biak	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan
D. Program Peningkatan Keberdayaan Pedesaan				
1	Pengendalian dan Pengelolaan Dana Desa	257 kmpg	Terlaksananya Pengendalian dan Pengelolaan dana Desa	257 kmpg

2	Pengendalian dan Pengelolaan Dana PROSPEK	257 kmpg	Terlaksananya program PROSPEK	257 kmpg
E. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan				
1	Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan BUMDES	Biak	Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan BUMDES	15 Kmpg
F. Program Peningkatan Sumber Daya Pemerintahan Kampung				
1	Fasilitasi Pemilihan Kepala Kampung untuk 8 kepala kampung	Biak	Terlaksannya Pemilihan Kepala Kampung di 8 (Delapan) Kampung	8 Kampung
2	Fasilitasi Pelantikan Kepala Kampung untuk 8 kepala kampung	Biak	Terlaksannya Pemilihan Kepala Kampung di 8 (Delapan) Kampung	8 Kampung

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa program pelayanan administrasi perkantoran yang terjadi semakin meningkat hal ini terlihat dari pagu tolak ukur dan target yang dicapai dalam 1 tahun baik dan tercapai. Sedangkan untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terlihat bahwa target dan tolak ukurnya baik karena hal ini dilihat dari pemeliharaan rutin gedung kantor tercapai. Sedangkan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sudah terlihat baik meskipun belum optimal, untuk Program Peningkatan Keberdayaan Pedesaan dari 257 Kampung sudah berjalan dengan baik meskipun masih perlu peningkatan dilakukan agar target bisa lebih tercapai, dalam hal ini Program Peningkatan Keberdayaan Pedesaan masih perlu

dilakukan lebih baik lagi, dan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan sudah berjalan dengan baik berdasarkan target dan tolak ukur, sedangkan Program Peningkatan Sumber Daya Pemerintahan Kampung masih perlu dilakukan lebih optimal lagi agar target dan sasaran bisa tercapai dengan baik. Untuk itu sebagai perbandingan dari program diatas maka penulis juga melihat data pada tahun 2022 berdasarkan tabel dianalisis bahwa peningkatan program yang terlaksana meningkat hal ini terlihat dri perbaikan sarana dan prasarana perkantoran yang ada di kabupaten biak Numfor, kemudian program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa sudah baik.

2. Efektivitas dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kampung Kabupaten Biak Numfor

Kecocokan antara rencana awal dan hasil aktual dapat digunakan untuk mengukur keefektifan. Jika hasilnya mengikuti rencana awal, strategi akan lebih efektif. Sebaliknya, bisa dikatakan tingkat efektivitasnya rendah jika hasilnya menyimpang dari rencana awal. Jadi, dalam konteks ini, outcome atau keluaran mengacu pada hasil dari penyelesaian tugas pokok dalam pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu untuk menilai indikator dari efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dalam meningkatkan pelayanan masyarakat sangat penting untuk dapat memberdayakan serta berdaya saing dalam pembangunan yang lebih baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aprilia Theresia, Dkk dalam (Pebrianti, 2021) Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengangkat status kelompok sosial yang kini terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pemberdayaan dalam konteks ini memungkinkan dan memberdayakan masyarakat.

Efektivitas organisasi dapat diteliti dari berbagai sudut dan bergantung pada siapa yang mengevaluasi dan menafsirkannya, oleh karena itu mengukurnya bukanlah tugas yang mudah. Seorang manajer produksi menawarkan kesadaran bahwa efektivitas melibatkan kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa bila dilihat dari sudut pandang produktivitas. Dengan membandingkan rencana yang ditentukan dengan hasil aktual yang dicapai, tingkat kemandirian juga dapat dievaluasi. Namun, dianggap tidak efektif jika kerja yang dilakukan atau hasil dari tindakan yang dilakukan tidak

cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan atau diantisipasi. Olehnya itu untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas pokok dalam meningkatkan pelayanan di masyarakat pada pemerintah kampung berdasarkan informasi dari informan A dapat kita lihat :

“bahwa Efektivitas Pelaksanaan sudah baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan perlu pembinaan untuk menjalankan tugas dan memimpin menkoordinasikan pelaksanaan tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung”

Senada yang dikatakan oleh informan B dapat dilihat :

“bahwa efektivitas Pelaksanaan Sudah berjalan dengan baik tetapi masih hal-hal yang perlu ditingkatkan pelayanan masyarakat dan perlu intervensi Program dan kegiatan strategis”

Berdasarkan hasil informasi dengan informan A dan B menunjukkan bahwa efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor Cukup Baik. Hal ini terlihat bahwa masih perlu ditingkatkan pelayanan masyarakat dengan melakukan perencanaan strategis agar dapat berjalan dengan baik dan efektif, disamping itu perlu koordinasi yang lebih intens di ruang lingkup internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Biak Numfor agar tercipta komunikasi dan kerja sama yang baik serta terjadinya pengawasan yang lebih efektif dalam pelayanan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan efektivitas dalam meningkatkan pelayanan pemerintah Kampung pada pemberdayaan masyarakat

kampung agar dengan berbagai item yang menjadi fokus penelitian dilihat dari Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Sistem pengawasan dan pengendalian serta faktor yang menghambat pelaksanaan efektivitas dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di dinas pemberdayaan masyarakat kampung kabupaten biak numfor.

a. Kejelasan Tujuan yang hendak dicapai

Semua tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan harus dipandang sebagai suatu proses untuk menjadi sukses. Dengan demikian, tahapan proses diperlukan agar tujuan akhir menjadi lebih baik. baik proses periodisasi maupun prosedur komponen-komponennya. Pencapaian tujuan memiliki 2 sub indikator yaitu: kurun waktu dan sasaran sebagai target konkrit. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan hasil pelaksanaan tugas. Apabila aparatur berhasil dalam melaksanakan pelaksanaannya maka pelayanan dikatakan efektif. Dengan kata lain, kinerja dan kompetensi aparatur sangat berperan dalam pencapaian tujuan pemerintah dalam pembangunan nasional. Penjelasan ini menunjukkan pentingnya posisi dan peran pemerintah dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Olehnya itu, Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya aparatur dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Hasil wawancara dengan informan A dan B diperoleh informasi :

“bahwa perencanaan yang matang atau dikerjakan oleh organisasi dimasa depan yang berlanjut sesuai dengan prosedur visi misi bupati dan wakil bupati biak numfor berpedoman pada rencana pembangunan panjang daerah (RPJPD) untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran yang ditetapkan”

Senada yang dikatakan oleh informan B dapat dilihat :

“Tujuan yang hendak di capai dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus sesuai visi misi pemerintah kabupaten biak numfor”

Informasi dari Informan diatas dapat diuraikan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai dilihat dari pelaksanaan tugas yang hendak dicapai dilihat cukup baik, hal ini karena dinas pemberdayaan masyarakat kampung berpedoman pada visi dan misi Bupati kabupaten biak numfor untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Olehnya itu pelaksanaan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terlihat optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan hasil pengamatan ditemukan bahwa kejelasan tujuan yang hendak dicapai untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat belum terlihat perkembangan pemberdayaan masyarakat, karena tujuan dan sasaran yang ingin dicapai belum maksimal hal tersebut terjadi karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk diberdayakan.

Medan yang harus dilalui cukup menantang, membuat beberapa penolong yang tidak semuanya berwatak sabar dan pesakitan enggan turun ke dusun guna melakukan penjangkauan. Akibatnya, tujuan tersebut belum tercapai karena kesulitan lain. Olehnya itu kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam meningkatkan pelayanan masyarakat belum optimal, karena terkendala pada sasaran pada visi dan misi yang dijadikan rujukan belum bisa dilakukan secara baik, disamping itu sarana dan prasarana yang belum memadai seperti sarana infrastruktur sehingga pegawai atau sumber daya manusia belum mampu melalui medan yang ada di kabupaten Biak untuk melakukan koordinasi kepada pemberdayaan masyarakat kampung dan masyarakat yang ada pada umumnya, untuk itu hal tersebut efektivitas pelaksanaan tugas pokok dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhambat.

b. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Agar para pelaksana tidak tersesat dalam deklarasi tujuan perusahaan, maka disadari betul bahwa strategi adalah jalan yang ditempuh dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Diperlukan rencana atau strategi yang matang untuk mencapai tujuan agar tujuan tersebut terarah selama proses pencapaian tujuan atau visi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tujuan pemasaran harus memiliki strategi. Proses penawaran target membutuhkan teknik yang jelas dan menarik. Sangat penting bagi manajemen untuk memperjelas strategi karena perusahaan hanya dapat menjadi produktif jika rencana yang digunakan mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan. Olehnya itu untuk lebih

jelasan berdasarkan wawancara dengan Informan A dapat kita lihat :

“berdasarkan visi misi,tujuan sasaran ,strategi arah kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMP kabupaten biak numfor tahun 2020-2024 maka DPMK MENETAPKAN indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendukung sebagai komitmen pencapaian sasaran RPJMP”

Senada informasi yang disampaikan oleh informan C dapat dilihat :

“Bahwa kejelasan strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan harus berkerjasama dengan baik antara pemerintahan kampung dan DPMK”

Berbeda halnya yang dikatakan oleh informan D selaku pemerintah kampung Mandow dapat dilihat :

“strategi pencapaian tujuan memiliki pelaksanaan tugas dengan melakukan perencanaan dan pengarahannya atau pegorganisasian dan pencapaian tujuan contohnya seperti mengangkat kembali kelembagaan kampung yang tidak berjalan seperti karang taruna di kampung mandouw”

Hasil wawancara diatas dapat diuraikan dan disimpulkan bahwa dalam startegi pencapaian tujuan yang hendak dicapai dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dalam meningkatkan pelayanan masyarakat belum optimal, hal ini terlihat bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat kampung hanya berpacu pada target pemerintah daerah, namun tidak melakukan koordinasi secara verbal kepada pemerintah kampung dalam meningkatkan kerjasama yang baik agar pelayanan kepada masyarakat berjalan

dengan baik terutama dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung di kabupaten biak numfor.

Kemudian statregi peningkatan dalam kerjasama membangun kembali organisasi yang ada di kampung belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat masih banyak kampung-kampung yang belum memiliki wadah organisasi untuk melakukan pemberdayaan tersendiri. Olehnya itu kesimpulannya bahwa dalam pencapaian strategi dan sasaran perlu kiranya DPMK untuk lebih melakukan komunikasi langsung kepada pemerintah kampung untuk lebih memberdayakan organisasi yang ada di setiap kampung sehingga proses pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terjadi sehingga pembangunan daerah maupun kampung bisa lebih maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang hendak dicapai. Disamping itu dilihat dari visi dan misi bupati pelaksanaannya belum terlihat secara signifikan hal ini disebabkan karena sumber daya yang dimiliki belum terkontrol dengan baik disamping itu sarana dan prasarana yang belum baik.

c. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Agar dapat menganalisis dan merumuskan secara efektif suatu kebijakan yang kuat yang sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, maka kebijakan tersebut harus dapat mengaitkan tujuan dengan upaya pelaksanaan operasional operasional. Proses panjang perumusan kebijakan atau siklus pengembangan kebijakan tentunya melibatkan banyak faktor yang harus diperhatikan dengan seksama, mulai dari isu dan permasalahan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut, tujuan yang

ditetapkan atau kebijakan yang dibuat, hingga latar belakang pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Dengan menerapkan berbagai teknik analisis kebijakan untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat pada setiap tahap proses pembuatan kebijakan dan dengan mengomunikasikan informasi dan analisis dalam bahasa yang dapat dipahami orang lain, analisis kebijakan publik dapat meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Hal ini berdasarkan informasi dari informan E selaku Kepala Bidang Pemerintahan dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dilihat :

"Kalau kami di DPMK terkait dengan kebijakan kami selalu melihat kepada visi dan misi bupati, namun untuk pelayanan masyarakat saya kira untuk itu belum terlalu baik, jadi kedepan kami akan melakukan perumusan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan".

Informasi diatas dapat diuraikan bahwa dalam proses perumusan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di dinas pemberdayaan masyarakat kampung belum terlihat baik, hal ini mengindikasikan bahwa proses komunikasi dan evaluasi dilapangan tidak terjadi untuk mendapatkan hasil dari permasalahan yang ada. Namun penjelasan yang dikatakan oleh sekretaris DPMK hanya sebatas melakukan pemantauan langsung dengan bermusyawarah kepada masyarakat namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti untuk dijadikan rumusan kebijakan agar tercipta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh informan A dilihat :

"bahwa setiap perencanaan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di DPMK atau dibuat

disusun dengan melihat kebutuhan kepentingan masyarakat”.

Informasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan DPMK berdasar pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat, namun hal tersebut tidak dilanjutkan dengan perumusan untuk dijadikan kebijakan sebagai bahan evaluasi kepada pemerintah kampung untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di kabupaten biak numfor. Disamping itu analisis perumusan kebijakan yang dilakukan belum terlihat secara efektif hal ini dipengaruhi dari segi sumber daya manusia yang ada belum terlihat kualitasnya, karena peningkatan pemberdayaan pegawai pada dinas pemberdayaan masyarakat kampung seperti pelatihan belum maksimal dilakukan. Oleh karena itu analisis perumusan kebijakan itu sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat disamping itu adanya kebijakan atau aturan dapat menjadi tolak ukur kepada masyarakat untuk dijadikan patokan dalam pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, tindakan harus diambil. Pemantauan adalah proses yang digunakan dalam analisis kebijakan untuk mengumpulkan data tentang penyebab dan dampak kebijakan publik. Untuk menetapkan premis-premis faktual tentang kebijakan publik, pemantauan bertujuan untuk memberikan asersi yang sifatnya penandaan, terutama yang bersifat kepentingan. Sementara peramalan menghasilkan penandaan sebelum tindakan diambil, pemantauan menghasilkan penandaan setelah kebijakan dan program dipilih dan selanjutnya diterapkan. Informasi yang terkait dengan pemantauan melayani setidaknya empat tujuan:

penyerahan, inspeksi, akuntansi, dan pembenaran. Hasil kebijakan datang dalam dua bentuk: keluaran dan dampak. Input dan proses digunakan untuk membuat keputusan kebijakan. Regulasi dan alokasi adalah dua tujuan utama dari tindakan kebijakan.

d. Perencanaan yang Matang

Intinya, perencanaan yang hati-hati melibatkan pengambilan keputusan sekarang tentang arah tindakan organisasi di masa depan. jika sudah ada konsep, tujuan, dan rencana manfaat. Kemudian saat implementasi tiba. Cobalah untuk tidak melewatkan apa yang Anda rencanakan selama implementasi (konsep, tujuan, dan manfaat). Jika ternyata Anda telah berubah dari cara Anda menyusunnya dalam rencana, kemungkinan besar Anda kurang dewasa saat membuat rencana awal. Saatnya Anda meninjau setelah Anda menyelesaikan tugas sebelumnya yang harus Anda selesaikan. Di sini, Anda fokus pada perencanaan sebelumnya yang Anda lakukan untuk tugas tersebut. Apakah kegiatan ini memiliki aspek negatif. Sehingga saat Anda mengulangi tugas serupa di masa mendatang, Anda mungkin sudah melakukan koreksi yang diperlukan. Selain itu, Anda harus memperhatikan tujuan sebelumnya yang Anda miliki untuk mengadakan aktivitas ini. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, apakah tujuan Anda tercapai? jika terungkap bahwa tujuan awal berbeda dari apa yang diantisipasi. Jika para pemimpin atau organisasi berencana untuk mengadakan kegiatan di masa mendatang, mereka juga harus mempertimbangkan hal ini. Berdasarkan Informasi yang dikatakan oleh Informan A dapat dilihat :

“program yang dilakukan membuat program kegiatan nyata ,sistematis dan terpadu di laksanakan di DPMK kabupaten biak numfor dalam rangka kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan”

Diperkuat oleh informasi dari informan E selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dilihat :

“Sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kegiatan yang sudah disusun oleh masing 2 bidangnya sesuai dengan yang telah direncanakan oleh DPMK”

Infomasi diatas menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dalam efektivitas pelaksanaan tugas pokok dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten biak numfor sudah cukup baik namun belum optimal. Hal ini terlihat dari program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan di pemerintahan kampung belum terealisasi dengan baik, misalnya pemberdayaan sarana dan prasarana serta wadah organisasi belum ditingkatkan. Hasil pengamatan penulis dilapangan ditemukan bahwa proses perencanaan yang telah dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat kampung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terlihat belum mencapai sasaran yang telah direncanakan, hal tersebut terjadi karena proses komunikasi yang dilakukan oleh DPMK kepada pemerintah kampung kurang terjadi jadi pemerintah kampung belum mengetahui secara keseluruhan dari program atau kebijakan yang telah dibuat. Seperti sosialisasi peraturan tentang kelembagaan adat belum berjalan dengan baik untuk dilakukan pelaksanaannya.

e. Penyusunan Program yang Tepat

pembuatan program yang sesuai Memiliki strategi yang baik masih membutuhkan saran dalam menempatkan program yang tepat karena, tanpa adanya panduan tersebut, para pelaksana tidak memiliki arah untuk bertindak dan bekerja. Jadwal kerja adalah bagian penting dari strategi pencapaian tujuan organisasi. Mungkin ada jadwal kerja di dalam organisasi tertentu yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan guna membantu organisasi dalam mencapai tujuan utamanya. Setiap individu atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja lebih produktif dan sistematis untuk memahaminya dengan bantuan program kerja. Program kerja dalam konteks ini adalah kumpulan rencana kegiatan kerja yang telah dibuat dan disepakati bersama dan akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus sederhana untuk dibuat karena akan berfungsi sebagai peta jalan organisasi untuk menyelesaikan tugas. Selain itu, program kerja itu sendiri dapat menjadi tolok ukur dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai pekerja, dan hasilnya akan dinilai pada akhir masa jabatan. Berdasarkan infomasi dari Informan A dapat dilihat :

“Program tahun 2020 di DPMK melaksanakan program antara lain; Program pelayanan administrasi kantor, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatann disiplin aparatur, Peningkatan kapasitas aparatur, Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan, Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan”

Informasi diatas menunjukkan bahwa program yang dilakukan dilihat dari penyusunan program kerja yang akan

dilaksanakan sudah baik, dan tepat sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan oleh bupati kabupaten biak numfor, oleh karena itu dalam hal implementasi sangat penting untuk ke depan apakah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Seperti yang dikatakan oleh informan B dapat dilihat :

“bahwa Menurut saya selama ini Penyusunan tetap berpacu pada rencana strategi (RENSTRA), jadi jenis program apa ya tetap bagaimana untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaannya tergantung kepada pemerintah kampung. Dalam Penyusunan program setiap bidang menyusun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi”.

Hasil informasi diatas menunjukkan bahwa penyusunan program yang tepat dalam meningkatkan efektivitas tugas pokok dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat itu sudah ada sebelumnya berdasarkan masing-masing disetiap bidang yang ada. Dan terkait dengan pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal hal ini terlihat dari ketersediaan prasarana dan anggaran sehingga proses pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Disamping itu dapat juga dianalisis bahwa penyusunan program yang telah direncanakan sebelumnya masih bertumpu pada setiap bidang yang ada dan kepada aparat pemberdayaan kampung sehingga hal ini dapat menyebabkan program yang telah disusun sebelumnya kurang efektif karena akan adanya program baru yang akan muncul dari aparat masyarakat kampung.

Sehingga disimpulkan bahwa dalam penyusunan program yang tepat dalam meningkatkan efektivitas tugas pokok

dalam pelayanan kepada masyarakat masih bersifat dokumen dalam bentuk pelaporan. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang dicanangkan oleh dinas pemberdayaan masyarakat kampung tidak optimal karena program yang di berikan masih tetap seperti sebelumnya sehingga aparat pemerintah kampung hanya mengikuti saja dengan membuat laporan. Karena program yang ditujukan untuk masyarakat dikecualikan dari program dan kegiatan penentuan keuangan, masyarakat seolah-olah menerima hibah dari pemerintah dan tidak diharuskan membayarnya kembali, yang menjelaskan mengapa program top-down kurang berhasil. tarif. Demikian pula, program top-down lebih sering gagal daripada program bottom-up. (Sutikno et al., 2015). kemudian hasil observasi dilapangan bahwa penyusunan program yang tepat terlihat secara jelas namun proses implementasinya dilapangan hanya sebatas pada bentuk laporan tapi hasil evaluasi tidak dilakukan agar terjadi pembenahan program untuk diperbaiki ke depan sehingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat kabupaten biak belum terlihat efektivitasnya. Kalau dari segi program yang ada di DPMK sudah baik namun proses pelaksanaannya belum optimal.

f. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Intinya, tujuan utama pengawasan adalah untuk menghentikan penyimpangan aktual atau kemungkinan dari tindakan yang dimaksud. Dengan

pengawasan dimaksudkan agar dapat membantu dalam melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan berhasil dan efektif. Juga, pilihan tentang aktivitas terkait biaya atau evaluasi tingkat penyelesaian tugas dilakukan melalui pengawasan. Dengan pemantauan, seseorang dapat mengevaluasi kemandirian kebijakan pemimpin dan frekuensi gangguan di tempat kerja.

Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi. Handayanungrat dalam (Susanti et al., 2020) Proses pengawasan adalah salah satu di mana pemimpin memeriksa untuk melihat apakah hasil pekerjaan diselesaikan oleh bawahannya yang sejalan dengan rencana, perintah, tujuan, atau spesialisasi yang ditetapkan. Jelas bahwa pengawasan harus didorong oleh tujuan yang telah ditetapkan, keterampilan yang telah ditentukan sebelumnya, dan rencana yang direncanakan (planning) yang telah disetujui oleh pemerintah (order), tentang cara melaksanakan pekerjaan (performance). Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu perencanaan. Dengan pengawasan maka perencanaan yang diharapkan manajemen dapat tercapai dan bekerja dengan baik. Hasil survei ini harus dapat menunjukkan di mana ada kecocokan dan ketidakcocokan dan mencari tahu penyebab ketidakcocokan tersebut. Dalam konteks membangun pemerintahan yang baik dalam bentuk pemerintahan yang baik, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga pemerintah berfungsi

dengan baik. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan tata kelola yang baik itu sendiri.

Olehnya Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung harus dikendalikan agar perangkat harus berada pada tempatnya, untuk memastikan bahwa tujuan strategi dapat tercapai. Oleh karena itu untuk lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian agar sekiranya perlu kerjasama yang baik oleh DPMK dan jajarannya untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Kemudian perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana seperti infrastruktur agar proses pemantauan dapat lebih efektif juga perlu peningkatan sumber daya manusia yang memadai agar proses pengawasan dapat dilakukan secara keseluruhan di setiap kampung yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas pokoknya.

D. KESIMPULAN

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Biak Numfor disimpulkan bahwa Belum Optimal. Hal ini terlihat dari efektivitas yang menjadi ukuran dan item dalam penelitian ini belum berjalan dengan efektif karena Kejelasan tujuan yang hendak dicapai cukup baik, proses pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya terakomodasi dengan pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Kejelasan strategi pencapaian tujuan belum efektif, hal ini

dinas pemberdayaan masyarakat kampung hanya berfokus pada visi dan misi pemerintah daerah namun strategi yang dilakukan kurang melibatkan pemerintah kampung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap belum optimal. Hal ini terjadi karena sosialisasi kebijakan yang dilakukan kepada pemerintah kampung dan masyarakat kurang efektif sehingga analisis kebijakan kadang tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Perencanaan yang matang terlihat baik karena program yang dilaksanakan sudah ada meskipun pelaksanaannya belum efektif. Penyusunan program yang tepat hal ini karena sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dalam melaksanakan tugas pokok untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amri, K., & Ferizko, A. (2020). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 13(1), 227–236.
- Anggraeni, S. L. (2022). Efektifitas Digitalisasi Dalam Pengajuan Administrasi Masyarakat Desa Mojomalang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(4), 5741–5750. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1950>
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>
- Aris, M., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2021). Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Governance Aand Politics*, 1(2), 127–133.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Mansyur, S. (2013). Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Academica*, 5(1), 965–972.
- Meitaningrum, D. A., Hardjanto, I., & Siswidiyanto. (2013). Efektivitas Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang). *Administrasi Publik*, 1(3), 192–199.
- Novatna, S., & Adnan, M. F. (2020). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Keluarga Berencana di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 3(1), 37–42. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i1.350>
- Pebrianti, B. (2021). *FUNGSI FASILITATOR SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK. ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU.*
- Rosilawati, Y., Amalia, D. A., & Ishak, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat : Kampung Tunagrahita Menuju Kampung Mandiri Desa Karangpatihan, Ponorogo, Indonesia.

- Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 127–137.
<https://doi.org/10.14710/interaksi.10.2.127-137>
- Sari, R. F. S. (2015). Studi Deskriptif tentang Efektivitas studi Deskriptif tentang Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Jalanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–9.
<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp500fbc7e9dfull.pdf>
- Sulasih, S., Novandari, W., & Suliyanto, S. (2022). Kajian Teologis Pemberdayaan Masyarakat Kampung Marketer Perspektif Epistemologi. *Perwira Journal of Community Development*, 2(1), 1–20.
<https://doi.org/10.54199/pjcd.v2i1.79>
- Susanti, V., Rizal, S., Indrayenti, I., Khairudin, K., & Haninun, H. (2020). Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 70.
<https://doi.org/10.36448/jak.v11i2.1525>
- Sutikno, S., Soedjono, E. S., Rumiati, A. T., & Trisunarno, L. (2015). Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(1), 135.
<https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.339>
- Taek, M. M., Wasistiono, S., & Meltarini, M. (2020). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 83–102.
<https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i2.1324>.